

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
PELAKU PETANI MAWAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
DESA KARANGPRING KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER**

***THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING
THE ECONOMY OF ROSE FARMERS DURING THE COVID-19
PANDEMIC IN KARANGPRING VILLAGE, SUKORAMBI DISTRICT
JEMBER REGENCY***

Uslifatul Hasanah*¹, Dr. Emy Kholifah R. M.Si²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jember

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail: uslifatul291@gmail.com, emykholifah@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Peran pemerintah saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena dimulai dari akhir 2019 bencana alam menyerang Indonesia bahkan seluruh dunia. oleh sebab itu terutama di desa karangpring kecamatan sukorambi kabupaten jember saat ini butuh peran pemerintah terutama di bidang pertanian, pertanian yang dimaksud yaitu petani mawar, adanya covid-19 ini banyak petani yang terdampak sehingga peran pemerintah desa memfasilitasi pemberdayaan melalui bantuan lahan bengkok. Tujuan penelitian ini seberapa berjalan peran pemerintah desa yang dilakukan saat ini sehingga kita paham peran apa saja yang dilakukan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Pemanfaatan lahan tanah bengkok oleh pemerintah Desa Karangpring dijadikan sebagai lahan pertanian Petani Mawar. pemerintah sudah berperan baik dalam memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan kepada para petani mawar di Desa Karangpring. Hal tersebut dibuktikan dengan petani yang menyatakan bahwa pemerintah telah banyak memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat khususnya petani sendiri dari mulai awal penanaman hingga pengolahan hasil menjadi bereneka ragam produk inovasi bunga mawar, sehingga budidaya mawar di Desa Karangpring saat ini telah mengalami perkembangan dan perkembangan ekonomi membaik.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Petani Mawar, Pemberdayaan

ABSTRACT

The role of the government is currently being needed by the community because starting at the end of 2019 natural disasters have attacked Indonesia and even the whole world. Therefore, especially in Karangpring Village, Sukorambi Sub-district, Jember Regency, the government currently needs the role of the government, especially in agriculture, rose farmer because of COVID-19, many farmers have been affected, so the role of the village government is to facilitate empowerment through crooked land assistance. The purpose of this research is how well the role of the village government is currently being carried out so that we understand what roles are being carried out. This research method is qualitative with a descriptive approach. The government has played a good role in providing education, training and skills to rose farmers in Karangpring Village. This is evidenced by farmers who state that the government has provided a lot of knowledge and

training to the community, especially the farmers themselves from the beginning of planting to processing the results into a variety of rose flower innovation products, so that rose cultivation in Karangpring Village is currently experiencing development and improving economic development.

Keywords: Role, Village Government, Rose Farmers, Empowerment

I. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, hampir seluruh dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan adanya infeksi berat dimana penyebabnya masih belum diketahui, jika dilihat dari laporan yang diterima dari Negara China kepada World Health Organization (WHO) teridentifikasi 44 pasien pneumonia yang berat di salah satu wilayah Kota yaitu Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang dikenal sebagai Corona Virus Disease (Covid-19), dengan China sebagai kasus awal bermula dari sebuah pasar basah yang menjual berbagai hewan laut. Kemudian penyebaran kasus ini menjalar dengan cepat terutama di dalam Negara Indonesia, berdasarkan laporan dari Worldometer (2020), di antara beberapa negara yang terjangkit virus, Indonesia menduduki ranking 32 daripada Amerika Serikat yang memiliki peringkat dengan kasus tertinggi.

Virus tersebut termasuk dalam penyakit menular dengan penyebabnya infeksi dari virus SARS-CoV2 atau dikenal dengan Virus Corona. WHO dan pemerintah Indonesia menyatakan virus ini sebagai pandemi dunia sebuah bencana non alam berupa penyakit dimana memerlukan penanggulangan dengan melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat. Berdasarkan dari keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana non

alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019, (Covid-19) sebagai bencana non alam secara nasional yang berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian materi serta menimbulkan implikasi permasalahan dalam bidang sosial ekonomi di Indonesia. Hampir seluruh Negara mendapatkan dampak buruk dinegaranya, menurut data BNPB yang menjelaskan tentang jumlah korban terinfeksi positif virus Covid-19 terus mengalami peningkatan, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah sejak awal virus tersebut dikabarkan masuk di Indonesia seperti contohnya kebijakan mematuhi protokol kesehatan berdasarkan himbauan dari WHO, penyediaan fasilitas kesehatan bagi pasien yang terkena virus Covid-19, serta kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*) meningkat menjadi Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) pada beberapa daerah yang sangat rentan terserang virus Covid-19.

Di Indonesia khususnya dilihat dari sisi perekonomian termasuk membawa konsekuensi yang sangat buruk disisi pertanian, perdagangan, pariwisata dan juga investasi. Dampak ini sangat membuat masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi sebab banyak para pekerja yang di PHK, kesulitan mencari pekerjaan, toko-toko

banyak yang tutup serta kegiatan ekspor impor juga menimbulkan efek yang serius akibat adanya wabah ini yang dikeluhkan masyarakat Indonesia. Permasalahan perekonomian secara menyeluruh saat ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia. Jika dilihat dari kegiatan perekonomian pada suatu negara, masyarakat telah mengetahui tentang peran pemerintah yang dibagi menjadi tiga komponen diantaranya sebagai pangatur, produsen, dan konsumen. Peran sebagai pengatur (*regulator*), pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, misalnya kebijakan fiskal. Peran pemerintah sebagai produsen adalah menyediakan sarana dan prasarana serta layanan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta peran pemerintah sebagai konsumen yaitu pemerintah melakukan pembelian terhadap barang ataupun jasa pada pasar dengan bersumber dari perusahaan atau industri rumah tangga individu [1]

Peningkatan ekonomi ini ditujukan kepada masyarakat yang mengalami penurunan dalam perekonomian pada masa Covid-19, yang mengakibatkan dampak yang sangat relevan dalam hidup masyarakat terutama masyarakat di Desa Karangpring banyak bahkan hampir seluruh masyarakat wilayah Karangpring mengeluh tentang perekonomian mereka akibat wabah ini, tentunya masyarakat mengalami dampak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu dampaknya yaitu sulit mencari

pekerjaan, ekonomi, harga pangan lokal menurun terutama di bagian kopi mereka kesusahan untuk menjual kepada pengulak akibat adanya Covid-19 dan petani kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sedangkan di Desa Karangpring masyarakat dominan pekerja petani, pekebun, dan pedagang. Petani tidak bisa menjual hasil panen akibat tempat yang biasanya untuk mengirim bahan pangannya tutup sementara, sedangkan bagi pekebun mereka tidak bisa mengirim hasil panen kopi kepada pembeli jika laku harga tidak seperti biasanya, adanya wabah ini mengakibatkan harga turun dengan sangat anjlok dan bagi para pekerja pabrik kopi masyarakat disuruh untuk tidak bekerja sementara sebab tidak adanya pemasukan untuk membayarnya. Jika dari pedagang banyak yang sudah tidak berjualan sebab diadakannya kebijakan PSBB dan Work Form Home tentu sangat minim pembeli. Jika dampak ini masih terus menerus maka dampak kemiskinan akan dapat berkepanjangan yang akan meningkatkan penurunan (*resesi*) ekonomi semakin buruk.

Dengan dampak yang sudah ada dan sudah jelas di kalangan masyarakat Desa Karangpring tentunya kondisi ini membutuhkan proses pengamatan peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi, dari segi mana pemerintah yang ada di Desa Karangpring untuk membantu kalangan masyarakat terutama kalangan bawah untuk mengurangi beban yang saat ini sedang gempar membuat kegelisahan untuk hidup sehari-hari. Dari peneliti yang di

dapat peran pemerintah desa melakukan sebuah kebijakan guna meringankan dampak wabah Covid-19 pada masyarakat, dimana peran ini dapat membantu mengurangi beban masyarakat untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diharapkan mampu terlaksana secara efektif supaya perbaikan pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai ekspektasi. Salah satu yang dilakukan pemerintah yaitu Desa Karangpring ini terkenal dengan Khas Bunga Mawar, petani bunga mawar yang sangat banyak namun hanya mengandalkan penjualan secara konvensional di sepanjang jalan protokol kota Jember. Padahal jika bisa dimanfaatkan lebih baik lagi maka akan menjadi komoditi produk baru yang mempunyai daya saing tinggi dan bisa menjadi produk andalan daerah agar bisa bersaing dengan produk-produk luar. hal ini mengingat bahwa sebagian besar lahan masyarakat Sukorambi ditanami oleh mawar dengan luas kurang lebih 50 hektar. Lahan pertanian yang ada di Desa Karangpring merupakan lahan milik masyarakat Karangpring Pengelolaan lahan masih secara tradisional. Pawacika yang ada mempunyai inisiatif agar bunga mawar ini dapat menjadikan hasil lokal yang dapat membantu pemulihan ekonomi dimasa pandemi diantaranya hasil olahan mawar tersebut menjadi beberapa produk seperti teh mawar, parfum mawar, pomade mawar, air mawar, sirup mawar, permen mawar, cilok mawar, es cream mawar. Terkesan sangat unik jika membaca produk yang dihasilkan

tetapi itulah kenyataan yang ada di lapangan, kemudian pemerintah desa membangun sebuah taman bermain yang terdapat dari beberapa umkm yang berjualan, didalam taman itu dinamakan dengan Rose Monument yang mempunyai arti khusus dari bunga mawar. Hal ini tentu membantu masyarakat yang mempunyai UMKM lokal untuk di kembangkan. Berbagai uraian di atas yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Mawar dimasa Pandemi Covid-19 (studi deskriptif pada pelaku petani mawar di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi) dimana kondisi ekonomi mengalami kegoncangan saat wabah covid-19 yang dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Saat ini banyak keluarga yang dipusingkan dengan masalah perekonomian akibat pandemic Covid-19. Banyak permasalahan yang ditimbulkan karena pengaruh Covid-19, yaitu mendadak kehilangan penghasilan atau kehilangan pendapatan rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dan berujung pada kemiskinan.

Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Petani Mawar pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam

Meningkatkan Ekonomi Pelaku Petani Mawar pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Pemerintah desa, yaitu penyelenggara pemerintahan di tingkat desa bagi masyarakat setempat dalam berbagai urusan dan kepentingan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat. Menurut pembagian secara administratif pemerintah desa berada dibawah kecamatan, didalamnya dipimpin oleh kepala desa, yang mempunyai hak otonom atau kewenangan dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan desa ialah “Suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa itu sendiri dan pemerintahan kelurahan. Berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu keanekaragaman pemikiran, partisipasi masyarakat, otonomi yang asli, demokratis serta pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

Ekonomi masyarakat sendiri sebuah kegiatan serta upaya pemenuhan kebutuhan hidup (*basic need*) dalam yang terdiri dari sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder lainnya seperti kesehatan dan

pendidikan. Maka dari itu ekonomi masyarakat perlu pemberdayaan yang diupayakan dalam peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berpotensi di dalam proses pembangunan nasional. Seluruh peraturan desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai lembaga ekonomi yang baru BUMDes berperan dalam peningkatan ekonomi pedesaan yang menjadi payung hukum bagi pelaku ekonomi dengan mengelola secara kolektif segala potensi yang dimiliki desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga kelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan potensi masyarakat perdesaan sangat diperlukan. Ekonomi dan penduduk memiliki keterkaitan, yaitu jika pertumbuhan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan pangan maka ekonomi dapat berkembang. Pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung sementara pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, maka jika pertumbuhan penduduk melebihi batas ukur maka kebutuhan pangan akan terbatas dalam memenuhi kebutuhan penduduk, menyebabkan tingkat perekonomian generasi mendatang cenderung buruk. Tujuan kelembagaan BUMDes adalah membangun kesejahteraan desa dengan menjadi desa yang mandiri. Dalam kemandirian desa itu sendiri terdapat;

- a. Kemandirian pemerintah desa (*Local Self Government*), dan

- b. Kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Community*).

Petani Mawar

Tanaman mawar dikenal sebagai bunga *Ros* atau *Ratu* bunga yang melambangkan spritual dalam kehidupan manusia. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebab manfaat yang dimilikinya diantaranya sebagai tanaman hias baik kebun ataupun taman, bunga potong, bunga tabor, tanaman hias pot, bahan baku seperti parfum dan bahan baku obat tentunya bisa juga sebagai bahan baku makanan serta minuman. Mawar ini banyak diminati oleh masyarakat akibat memiliki warna yang bagus serta kelopak bunga yang sangat indah. Peminat terbanyak mawar ini biasanya terutamanya orang yang berada di perkotaan. Bunga mawar saat ini sudah mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut saat ini sudah banyak masyarakat terutama petani mawar yang melakukan kegiatan usaha budidaya bunga mawar, budidaya mawar itu sendiri tidak terlalu sulit untuk dilakukan asal dapat memenuhi syarat tumbuh sehingga tanaman bunga mawar tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi yang sesuai.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, penelitian ini lebih di fokuskan pada peranan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada informan lalu informan menjawab pertanyaan dari peneliti secara bebas namun berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Informan dalam wawancara ini adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Karangpring.

b. Observasi

Pada penelitian ini dilakukan observasi pada kegiatan yang dilakukan pada desa dalam mengatasi perekonomian masyarakat di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dimasa pandemi covid-19.

c. Dokumentasi

Menurut [2] dokumentasi adalah salah satu cara dalam penyimpanan data dan informasi yang telah diperoleh dengan melakukan catatan-catatan penulisan, pengambilan gambar dari hasil penelitian.

Metode dalam Analisis Data

Menurut [3] peneliti menggunakan metode analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif. Metode ini dilakukan pada data hasil perolehan dari hasil wawancara, penguraian berbentuk prosa yang dihubungkan dengan data lain dengan tujuan agar memperoleh informasi kejelasan tentang kebenaran atau sebaliknya sehingga dapat dijadikan sebagai penguat dari gambaran yang telah ada dan terjadi.

Keabsahan Data

Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data yang didapatinya sehingga temuan-temuan penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut pengertian dari [4] disebut triangulasi, yaitu pemeriksaan data dengan pemanfaatan sesuatu di luar data guna keperluan pengecakan atau pembanding dari data penelitian yang ingin diperoleh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk memiliki komoditas hortikultura contohnya tanaman hias florikultura. Desa Karangpring memiliki tanaman hias yang dikembangkan yakni bunga mawar. Desa ini menjadi salah satu sentra kawasan budidaya bunga mawar di Kabupaten Jember. Oleh karena hal tersebut, peran pemerintah desa dalam mengembangkan dan khususnya meningkatkan ekonomi pelaku petani mawar di desa ini sangat diperlukan. Ekonomi pelaku petani mawar berkaitan erat dengan perkembangan budidaya bunga mawar. Desa sentra bunga mawar ini akan berkembang apabila pemerintah turut berperan mengembangkan dan pelaku petani mawar memiliki ekonomi yang sejahtera.

Fungsi pemerintah yang kaitannya dengan pemberdayaan pelaku petani bunga mawar yakni mengarahkan petani dalam kemandirian dan pembangunan agar tercipta kemakmuran. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah yang

secara optimal dan mendalam untuk membangun kemandirian pelaku petani bunga mawar. Peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi pelaku petani mawar Desa Karangpring di masa pandemi Covid-19 dapat difokuskan pada 3 peran, yakni meliputi peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. Peran sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator merupakan peran menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Peran pemerintah Desa Karangpring dalam hal ini yakni memberikan aturan-aturan dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi pelaku petani mawar di Desa Karangpring. Terkait kebijakan dalam hal pemberdayaan petani bunga mawar, pemerintah Desa Karangpring telah berperan baik dalam melaksanakan peraturan daerah dan memberi arahan kepada para petani mawar terkait kebijakan dalam hal pemberdayaan petani mawar, hal tersebut dibuktikan dengan petani yang telah merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut. Selain petani bunga mawar, pelaku UMKM di Desa Karangpring juga turut merasakan kebaikan dari kebijakan-

kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Karangpring, selain itu Pemerintah Desa Karangpring telah memberikan fasilitas bagi petani bunga mawar dari mulai pendidikan, sarana prasarana dan juga fasilitas lain terkait pemasaran hasil budidaya mawar mereka, Pemerintah Desa Karangpring juga telah berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas pelaku petani mawar, dibuktikan dengan pendapat petani dan pihak UMKM yang menyatakan bahwa pemberdayaan budidaya bunga mawar di Desa Karangpring saat ini lebih baik atau lebih maju dibanding sebelum mendapat berbagai bantuan dari pemerintah desa.

2. Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan peran dalam menggerakkan partisipasi multi pihak ketika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah pusat yang berkesinambungan pada pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam hal ini bertujuan untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi pelaku petani mawar Desa Karangpring yang meliputi peningkatan kapasitas pemberdayaan

petani mawar, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan agen mempercepat perubahan.

Peran pemerintah sebagai dinamisator dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani mawar di Desa Karangpring sudah baik yakni dengan memberikan berbagai penyuluhan kepada para petani bunga mawar sekaligus pihak UMKM Desa Karangpring. Akan tetapi di masa pandemi, penyuluhan semakin berkurang dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk tidak melakukan kerumunan supaya tidak terjadi penyebaran penyakit.

Peran pemerintah sebagai dinamisator (penggerak) terkait peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil budidaya mawar di Desa Karangpring sudah dilakukan secara optimal, hal tersebut dibuktikan dengan hasil produk olahan dari bunga mawar Desa Karangpring sudah beraneka ragam, dari yang dulunya hanya dipasarkan dalam bentuk bunga tabur ke makam, saat ini berubah menjadi inovasi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi.

Pemerintah Desa Karangpring juga telah menjadi agen perubahan bagi budidaya mawar di Desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya budidaya mawar di

Desa Karangpring serta meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar. Pemberdayaan budidaya mawar yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangpring sangat memberi dampak positif pada perkembangan masyarakat di Desa ini.

3. Peran sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah[5]. Sebagai fasilitator pemerintah harus menjadi agen yang dapat memberi atau membantu fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan tujuan dari pemberdayaan yakni terkait dengan bantuan perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi, teknologi, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik, permodalan/kredit yang diperlukan dalam proses produksi [6].

Pemerintah juga berperan menjadi penggerak dalam mendampingi pemberdayaan petani melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemberian modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Pemerintah sebagai fasilitator juga memiliki tanggung jawab hingga

kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan petani untuk keberlangsungan suatu kegiatan pemberdayaan. Dengan tersedianya bibit unggul, pupuk dan sarana prasarana produksi akan mendorong partisipasi dari masyarakat petani untuk memanfaatkannya sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator dalam kegiatan ini dapat lebih optimal.

Pemerintah selaku fasilitator dalam penyedia sarana dan prasana bagi masyarakat sudah mampu menyediakan kebutuhan sarana dan prasara masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat pada pelaku petani bunga mawar di Desa Karangpring sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi petani, mawar. Namun dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan saat pandemi covid 19 sarana prasarana yang diberikan banyak yg tidak digunakan selama pandemi sebab konsumen berkurang. Sarana prasarana akan lebih maksimal penggunaannya apabila penjualan hasil budidaya mawar juga meningkat.

Pemerintah dalam memberikan modal kepada petani mawar di Desa Karangpring saat ini masih kurang, permodalan dalam bentuk uang memang kurang diberikan, akan tetapi modal dalam bentuk fasilitas telah banyak diberikan kepada petani mawar di Desa Karangpring.

Pemberian modal berupa uang semakin berkurang disebabkan karena pada saat pandemi covid 19 difokuskan pada penanganan covid 19 di Desa Karangpring berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Hal itu tidak menyurutkan semangat petani, petani memakai modal sendiri untuk mengembangkan usaha taninya pada saat pandemi.

Pemerintah Desa Karangpring sudah berperan baik dalam memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan kepada para petani mawar di Desa Karangpring. Hal tersebut dibuktikan dengan petani yang menyatakan bahwa pemerintah telah banyak memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat khususnya petani sendiri dari mulai awal penanaman hingga pengolahan hasil menjadi beraneka ragam produk inovasi bunga mawar, sehingga budidaya mawar di Desa Karangpring saat ini telah mengalami perkembangan. Selain itu, ekonomi masyarakat sekitar juga mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan budidaya bunga mawar di Desa ini.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Desa

Dalam Meningkatkan Ekonomi Pelaku Petani Mawar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember., maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah Desa Karangpring sebagai regulator menunjukkan bahwa pemerintah Desa telah berperan secara optimal terkait kebijakan dalam hal pemberdayaan petani, kemampuan memfasilitasi, dan meningkatkan produktivitas petani sehingga budidaya bunga mawar di Desa Karangpring semakin berkembang. Disaat pandemi pemerintah memberikan kebijakan berupa inisiatif untuk petani bunga mawar bekerja sama dengan pihak UMKM dalam melakukan pemasaran produk hasil budidaya mawar melalui media sosial whatsapp, facebook, instagram dan sebagainya.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah sebagai dinamisor menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karangpring telah berusaha berperan dengan optimal terkait peningkatan kapasitas pemberdayaan petani, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan, dan sebagai agen perubahan sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam proses budidaya mawar di Desa Karangpring. Meskipun pada saat pandemi Covid-19, pendidikan dan pelatihan semakin berkurang disebabkan dilarangnya kerumunan oleh pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah segera memulihkan

kembali kegiatan pendidikan dan pelatihan pada saat pandemi mereda.

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pemerintah Desa Karangpring telah berupaya sebaik mungkin terkait penyediaan sarana dan prasarana, memberikan modal kepada kelompok tani dan penyediaan pendidikan, pelatihan serta keterampilan. Meskipun pada saat pandemi pemberian modal berupa uang semakin berkurang akibat pemfokusan pada penanganan Covid-19 di Desa Karangpring, akan tetapi hal itu dianggap wajar oleh para petani.
4. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan ekonomi petani mawar Desa Karangpring Sukorambi diketahui bahwa pemberdayaan budidaya bunga mawar di Desa Karangpring oleh pemerintah sangat berdampak positif pada peningkatan ekonomi petani mawar dan masyarakat sekitar.

Saran

Adapun mengenai saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan, pelatihan serta pendampingan kepada petani mawar di Desa Karangpring sebaiknya dilakukan secara intens dan berkelanjutan. Pemerintah juga dapat mendirikan pos konsultasi untuk para petani mawar di Desa Karangpring sebagai wadah konsultasi dan koordinasi terkait masalah-masalah yang di hadapi oleh petani di Desa ini.

2. Peningkatan lain untuk hasil budidaya mawar di Desa Karangpring perlu ditingkatkan kembali seperti menjadikannya bunga potong yang memiliki pasar dan nilai jual yang tinggi serta dapat menjadikannya sebagai desa ekowisata agar pendapatan masyarakat di Desa Karangpring semakin meningkat
3. Perluasan pemasaran bunga mawar hasil budidaya di Desa Karangpring juga diperlukan agar mawar dari desa ini semakin terkenal dan Petani semakin bersemangat dan pembudidayaan bunga mawar di Desa Karangpring.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dan penelitian saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. K. Nurkholis, *penganggaran sektor publik*, Buku Peta. Jakarta, 2019.
- [2] Koentjoningrat, *Metodelogi Penelitian Masyarakat*, Gramedia. Jakarta, 2001.
- [3] J. Sugiono, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: Reinika Cipta, 2011.
- [4] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- [5] N. Afni, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan masyarakat Petani di Kecamatan Sinoa Kabupaten

Bantaeng. Unismuh Makassar,” *Unismu
Makasar*, 2014. .

- [6] C. Soleh, *dialektika pembangunan
dengan pemberdayaan*. Bandung, 2014.

